

SKRIPSI

**PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN DESA
STUDI KASUS DESA BABUSALAM KECAMATAN GERUNG
KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2019**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Setara Satu (S1)
Ilmu Pemerintahan Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram



OLEH:

NURUL HIDAYAH

NIM. 216130074

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

2020

LEMBAR PERSETUJUAN

**PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN DESA
STUDI KASUS DESA BABUSALAM KECAMATAN GERUNG KABUPATEN
LOMBOK BARAT TAHUN 2019**



**Nurul Hidayah
Nim. 216130074**

**PROGRAM STUDI
ILMU PEMERINTAHAN**

Telah di periksa dan di setujui untuk di uji pada ujian skripsi
Mataram, 13 Agustus 2020

Dosen Pembimbing I,

Dr. H. MUHAMMAD ALI, M.Si
NIDN 0806066801

Dosen Pembimbing II,

HIDAYATULLAH, S.IP., M.IP
NIDN:0809038902

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan



Arifullah Hadi, S.IP., M.IP.
NIDN: 0816057902

LEMBAR PENGESAHAN
SKRIPSI
"PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN DESA
STUDIKASUS DESA BABUSALAM KECAMATAN GERUNG KABUPATEN
LOMBOK BARAT TAHUN 2019"

Disusun dan diajukan oleh

NURUL HIDAYAH



NIM. 216130074
PROGRAM STUDI
ILMU PEMERINTAHAN

Telah dipertahankan dalam Ujian Skripsi Pada tanggal: 13 Agustus 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Tim Penguji

1. Dr. H. MUHAMMAD ALL M. SI

NIDN 0806066801

2. HIDAYATULLAH, S. IP., M. IP

NIDN: 0809038902

3. Dr. SITIATIKA RAHMI M. SI

NIDN. 0815118302

Ketua (.....)

Anggota II (.....)

Anggota III (.....)

Mengetahui,

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram

Dekan,



Dr. H. Muhammad All M. Si
NIDN. 0806066801

PEYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram:

Nama : Nurul Hidayah

Nim : 216130074

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Judul Skripsi : "Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan Desa Studi kasus Desa Babusalam Kecamatan gerung kabupaten Lombok barat tahun 2019

Menyatakan bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemetaan asli dari saya dalam pernyataan asli dari saya sendiri. Bukan merupakan duplikat skripsi orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Demikian pernyataan ini saya buat sesungguhnya apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di universitas muhammadiyah mataram.

Mataram 17 Agustus 2020

Yang member pernyataan



Nurul Hidayah

216130074



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
 Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
 Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
 PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Saya sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURUL HIDAYAH
 NIDN : 216130034
 Tempat/Tgl Lahir : Menang Timur 23. Juli 1998
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 Fakultas : FISIPI
 Hp/Email : 087 065 851 074
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa harus meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan tetap pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

eksistensi Persempuan Dalam Pembangunan Desa Study kasus Desa Babusaian Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019

bagaimana tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

tanggal : 18.07.2020

Tanda Tangan

NURUL HIDAYAH
 NIDN 216130034

Mengetahui,
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Skandar, S.Sos., M.A.
 NIDN. 0802048904

Motto

Menjadi pribadi yang bermanfaat adalah salah satu

Karaktr yang harus dimiliki muslim,

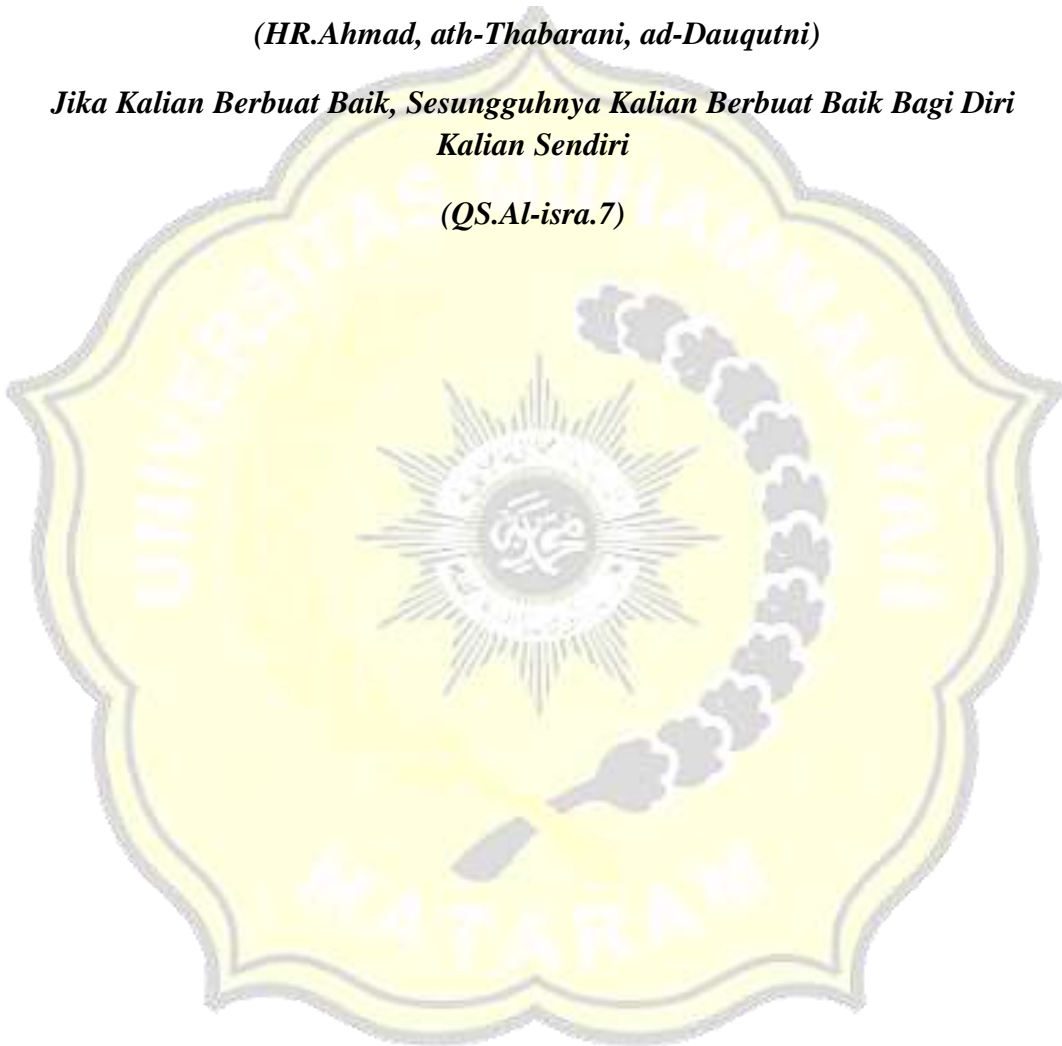
Rosullulahsallallahu 'alaihiwallambersabda

Sebaikbainya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusialainnya

(HR.Ahmad, ath-Thabarani, ad-Dauqutni)

***Jika Kalian Berbuat Baik, Sesungguhnya Kalian Berbuat Baik Bagi Diri
Kalian Sendiri***

(QS.Al-isra.7)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan untuk orang tercinta dan tersayang atas semua dukungan yang telah di berikan

Ayahanda (saifullah) dan ibunda (buniarai)

Terimakasih karena selalu menjaga saya dalam doa-doa ayah dan ibu sertakan,

Mebiarkan saya mengejar impian saya apapun itu,

Semua pemberian ini tidak akan bisa saya balas, hanya bisa berikan kata lulus buat ayah dan ibu

Semoga hasil dan perjuangan selama ini bisa membahagiakan ayah dan ibu.

*Dan buat kaka q tersayang(HusnulKhatimah, SH.)
terimakasih sudah selalumemberikan dukungan, motifasi,
dan omelansehinga bisa sapai pada titik ini*

(anauhibbukumfillah)



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengkaruniakan berkah dan kasih sayang-Nya sehingga atas izin-Nya peneliti akhirnya dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul “ **Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan Desa Studi Kasus Desa Babusalam Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019**” dengan penuh ketercapaian lainnya.

Peneliti menyadari bahwa terselesainya skripsi ini tak lepas dari campur tangan berbagai pihak. Untuk itulah peneliti ingin berterimakasih sebesar-besarnya dan memberikan penghargaan setinggitingginya kepada pihak-pihak terkait.

Dengan selesinya penelitian skripsi ini, peneliti mengucapkan terimakasih yang tiada tara untuk kedua orang tua peneliti, ayahanda sipullah tercinta dan ibunda buniari yang telah menjadi orang tua terhebat yang selalu memberikan motivasi, nasihat, cinta, perhatian dan kasih sayang serta doa yang tentu takan bisa peneliti balas. Untuk saudara ku tercinta husnul khatimah.sh terimakasih atas kasih sayang, dukungan dan senantiasa menemani dalam menyelesaikan skripsi ini.

Pembuatan skripsi ini tentunya tidak luput dari bantuan berbagai pihak yang diberikan secara langsung ataupun tidak langsung kepada peneliti. Oleh karena itu melalui kesempatan ini peneliti tidak lupa untuk menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, teruntuk kepada:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd Gani, M.PD selaku Rektor Uuniversitas Muhammadiyah Mataram yang memberikan kesempatan atas arahan dan bimbingannya selama tiga tahun perkuliahan
2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M,Si selaku Dekan fakultas ilmu sosial dan politik universitas muhammadiyah mataram beserta para staf dan jajaran yang telah memberikan arahan dan pelayanan selama perkuliahan.
3. Bapak Ayatullahadi S.IP, M,IP selaku ketua prodi ilmu pemerintahan yang telah memberikan bimbingan selama perkuliahan.
4. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M,Si selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan selama penelitian skripsi ini.
5. Bapak Hidayatullah, S.IP, M.IP selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama penelitian skripsi ini.
6. Para dosen studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan bimbingan selama kurang lebih 3 tahun perkuliahan.
7. Seluruh staf akademik FISIF Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah membantu dalam pengurusan surat-surat kelengkapam selama peneliti kuliah.
8. Terimakasih pada staf kantor Desa Babusalam, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat yang telah mengizinkan peneliti melakukan penelitian skripsi.

9. Terimakasih untuk “Anak-anak Alay “(Melda, Nita, Ani, Yani, kakak Indah) yang telah memberikan motivasi, nasehat serta teman-teman seperjuangan selama penelitian skripsi ini.
 10. Terimakasih pada sahabat-sahabat ku Riri Surya Hardi dan Dinda Nursah Yasti yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini
 11. Terimakasih pada Penyusp yang telah menemani untuk menyelesaikan skripsi ini.
 12. Terimakasih Kepada adik ku tercinta dan tersayang Rosida Nursanti yang telah menemani menyelesaikan skripsi ini.
 13. Teman teman seperjuangan selama perkuliahan ‘*Governance B*’ dari 2016-2020 yang tidak dapat di tuliskan stu persatu terimakasih atas segala bantuan dan perhatian kalian selama perkulihan.
- Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu peneliti dengan besar hati dan ihklas menerima saran maupun keritik yang membangun dari pembaca guna memperbaiki serta menyempurnakan karya tulis ini.

Mataram 6 Agustus 6,
2020

Peneliti

NURUL HIDAYAH
216130074

ABSTRAK
PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN DESA
STUDY KASUS DESA BABUSALAM KECAMATAN GERUNG
KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2019

Nurul Hidayah
216130074

Partisipasi dalam pembangunan adalah keikutsertaan masyarakat dalam suatu proses pembangunan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana partisipasi perempuan dalam pembangunan di desa babusalam dan faktor yang mempengaruhi partisipasi perempuan dalam pembangunan desa di desa babusalam. Teori yang di gunakan untuk mendukung focus penelitian adalah teori pembangunan, teori partisipasi, teori partisipasi perempuan dan konsep pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa partisipasi perempuan dalam pembangunan di desa babusalam kecamatan gerung, Kabupaten Lombok Barat, sudah ikut serta dalam berpartisipasi dalam pembangunan yang ada di desa dan ada beberapa faktor internal dan faktor eksternal yang di miliki masyarakat babusalam sehingga mempengaruhi partisipasi perempuan dalam pembangunan yang ada di desa babusalam, sehingga masyarakat desa babusalam tidak sepenuhnya bisa ikut dalam berpartisipasi dalam pembangunan yang ada di desa babusalam.

Kata kunci: partisipasi perempuan.

ABSTRACT

**WOMEN'S PARTICIPATION IN VILLAGE DEVELOPMENT
CASE STUDY OF BABUSALAM VILLAGE, GERUNG, WEST LOMBOK IN
2019**

**Nurul Hidayah
216130074**

Participation in development is community engagement in the establishing process. The purpose of this study was to analyze how women's involvement and the factors affecting women's participation in Babusalam village development. The theories used to support the research focus are development theory, participation theory, women's participation theory, and community empowerment. This research applied the qualitative approach. The results of this study showed that women in Babusalam village, Gerung sub-district, West Lombok has well-participated in the village establishment. Several internal and external factors exist in the Babusalam community to affect women's participation in development. Besides, not all of Babusalam village communities can fully participate in the village development.

Keywords: women's participation

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO CGPT E-DESIGN ASLINYA
MATAKAM
KEPALA
UPT P313
UNIVERSITAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

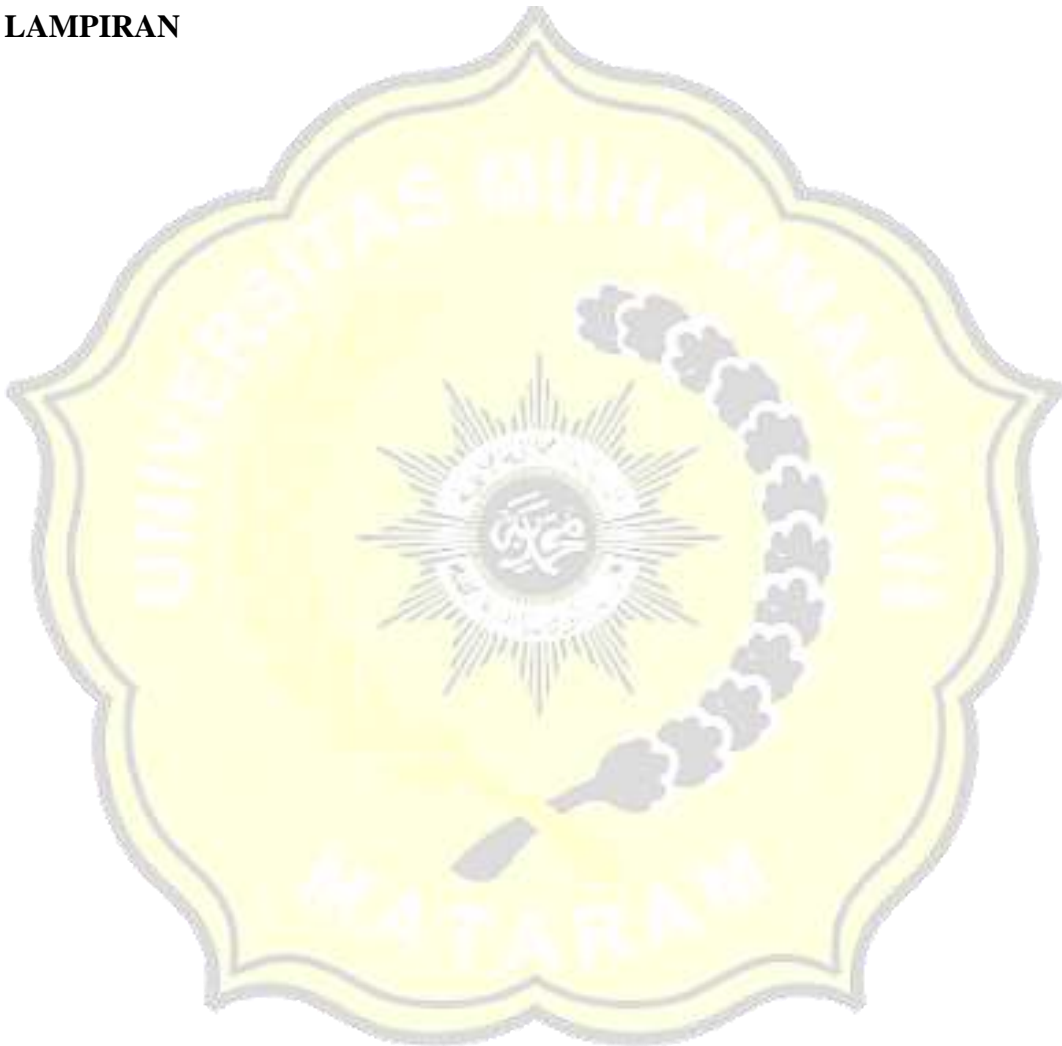
Humaira, M.Pd
NIDN. 0803048601

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN BERSEDIA DI PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	xi
ABSTRAC.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN TEORI	8
2.1 Penelitian Terdahulu	8
2.2 Pembangunan	15
2.2.1 Konsep Pembangunan.....	15
2.2.2 Tujuan Pembangunan.....	20
2.2.3 Ciri-ciri pembangunan	18
2.2.4 Indikator pengukuran keberhasilan Pembangunan	21
2.3 Partisipasi	24
2.3.1 Definisi Partisipasi	24
2.3.2 faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi	28
2.3.3 Bentuk partisipasi masyarakat.....	31

2.3.4 Tujuan Partisipasi Masyarakat	31
2.4 Partisipasi Perempuan	29
2.4.1 Definisi Partisipasi Perempuan	33
2.4.2 Konsep partisipasi perempuan	35
2.4.3 Analisis Gender Perspektif Longwe.....	37
2.4.4 Peran perempuan dalam pembangunan.....	41
2.5 Konsep Pemberdayaan Masyarakat	44
2.5.1 Indikator pemberdayaan.....	46
2.6 Kerangka Berpikir	48
2.7 Definisi Konseptual	49
2.8 Definisi Operasional.....	49
BAB III METODE PENELITIAN	51
3.1 Lokasi Penelitian.....	52
3.2 Informan Penelitian.....	52
3.3 Sumber Data.....	53
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	53
3.5 Teknik Analisis Data.....	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	58
4.1. Gambaran Umum lokasi Penelitian	58
4.1.1 Letak Dan Luas Wilayah	58
4.1.2 Iklim.....	59
4.1.3 Jumlah Penduduk.....	59
4.1.4 Mata Pencaharian Pokok.....	60
4.1.5 Tingkat Pendidikan	60
4.1.6 Sarana Kesehatan	61
4.1.7 Agama Penduduk	62
4.1.8 Sarana Ibadah.....	63
4.1.9 Pemerintahan	63
4.1.10 Struktur Organisasi	65
4.1.10 Visi Dan Misi	66

4.2 Hasil Penelitian	67
4.2.1 Partisipasi Perempuan Yang Ada Di Desa Babusalam Dalam Pembangunan Desa	71
4.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi perempuan dalam pembangunan yang ada di desa babusalam.....	85
5.1 Kesimpulan.....	94
5.2 Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Table penelitian terdahulu	13
Table mata pencaharian	60
Table pendidikan	61
Table kesehatan	62
Table penduduk	62
Table sarana ibadah	63
Table masyarakat yang bekerja	68



DAFTAR GAMBAR

Gambar Kerangka Bertfikir Penelitian.....48
Gambar Struktur Organisasi.....65



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak pemerintahan Orde Baru ke pemerintahan Revormasi muncul Undang-Undang Otonomi Daerah No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang mengatur secara gamblang tentang Pemerintahan Daerah (Perda), di mana pemerintahan pusat melimpahkan kewenangan pemerintahn untuk mengatur daerahnya sendiri dan masyarakatnya. Dengan adanya undang-undang otonomi daerah ini pemerintahan daerah diminta untuk menata kembali aktifitas-aktifitas terdahulu dengan tampilan yang lebih baru untuk melaksanakan pelayanan Negara dan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pembangunan nasional pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan secara terus menerus untuk mewujudkan bangsa indonesia sebagai bangsa yang sejajar dengan bangsa-bangsa yang maju baik dengan taraf hidup maupun dalam berbagai bidang dan berbagai aspek kehidupannya, untuk di jadikan acuan dan panduan dalam pembangunan nasional, terutama pada era reformasi. Secara konseptual pembangunan adalah segala upaya yang dilakukan secara terencana dalam melakukan perubahan dengan melakukan tujuan utama memperbaiki dan meningkatkan kualitas manusia.Perbaikan taraf hidup memerlukan prakondisi yaitu ifrastruktur, srana dan prasarana yang dapat memberi pengaruh terhadap peningkatan hakikat dan martabat bangsa.

Wilayah pedesaan yang luas dan jumlah penduduknya sangat banyak, tingkat pendapatan, tingkat pendidikan dan derajat kesehatan adalah rendah, ditambah lagi aksesibilitas terhadap faktor-faktor produktif, modal usaha dan investasi dan memperoleh informasi sangat sangat lemah, sehingga kemajuan dan kesejahteraan masyarakat pedesaan jauh tertinggal dibandingkan masyarakat perkotaan. Pembangunan pedesaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, merupakan usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia pedesaan dan masyarakat secara keseluruhan yang dilakukan secara keseluruhan yang dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan pada potensi dan kemampuan pedesaan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah membuka ruang terhadap partisipasi warga pembangunan desa. Hal ini seiring dengan adanya kebijakan dana desa dari pemerintah pusat. Dengan ini warga desa diharapkan mampu memanfaatkan peluang untuk berpartisipasi dalam memajukan desanya namun dalam peraktiknya, terdapat berbagai kendala dalam berpartisipasi warga desa yaitu warga yang enggan terlibat dalam forum-forum yang ada di desa. Pada Bab V Penyelenggaraan Pemerintahan Desa bagian ke lima Pasal 58 tentang jumlah anggota permusyawaratan desa di di tetapkan dengan jumlah paling sedikit 5(lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan desa (UU No 6 Tahun 2014). Musyawarah desa juga diatur dalam peraturan pemerintahan no 43 tahun 2014 pada pasal 80 disebutkan, unsur serikat terdiri dari tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan

kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok perajin, kelompok perempuan, perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak, dan perwakilan kelompok masyarakat desa.

Partisipasi anggota masyarakat adalah keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program/proyek pembangunan yang dikerjakan di dalam masyarakat lokal. Partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pembangunan (pedesaan) merupakan aktualisasi dari kesediaan dan kemampuan anggota masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi dalam implementasi program yang di laksanakan. Peningkatan partisipasi masyarakat merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat secara aktif yang berorientasi pada pencapaian hasil pembangunan yang dilakukan dalam masyarakat (pedesaan).

Keterlibatan perempuan dalam pembangunan terus menjadi perhatian pada kebijakan pembangunan Indonesia. Upaya ini tidak hanya dalam pelaksanaan tetapi juga dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian dari hasil sebuah kegiatan. Tujuan dari melibatkan masyarakat terutama perempuan dalam menentukan kebijakan, yang menyangkut kebutuhan masyarakat ini sendiri upaya untuk meningkatkan kapasitas untuk mengurangi angka kemiskinan. Hal ini dapat dilihat pada Undang-ndang No 25 Tahun 2004 tentang perencanaan pembangunan yang memberikan peluang besar untuk keberpihakan pada masyarakat dalam perencanaan pembangunan, sehingga masyarakat mempunyai hak yang sama untuk proses perencanaan tersebut.

Diprioritaskan pada keterlibatan perempuan di semua tahapan dan proses seperti dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrembang).

Babusalam merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Desa Babusalam merupakan satu dari 11 desa dan kelurahan yang berada di kecamatan Gerung, Desa ini memiliki jumlah penduduknya sebagian besar bersuku daerah Lombok. Sebagian besar penduduknya bermatapencarian petani, desa ini terletak di bagian barat pulau Lombok. Untuk berpartisipasi dalam hal pembangunan di desa, masyarakat Babusalam khususnya perempuan secara struktur sudah dilibatkan dalam perencanaan pembangunan akan tetapi keterlibatan mereka masih kurang.

Berdasarkan permasalahan yang dialami di desa Babusalam dengan jumlah perempuan sebanyak 4.710 orang, mengenai keterlibatan atau partisipasi perempuan tersebut, yaitu masih adanya kurang dalam berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan. Hal ini dikarenakan adanya faktor yang menjadi penghambat mereka (perempuan) dalam ikut serta berkegiatan, salah satu faktornya yaitu adanya kesibukan dalam hal pekerjaan maupun adanya tanggung jawab terhadap keluarga masing-masing. Selain faktor tersebut, hal lainnya juga adanya pola pikir masyarakat yang masih kurang terhadap pentingnya pembangunan desa, jadi maksudnya adanya sikap “masa bodoh” oleh masyarakat (perempuan) terhadap pembangunan karena mereka merasa bahwa hal itu tanggung jawab pemerintah, padahal sebenarnya peran

masyarakat juga sangatlah penting karena ini menjadi salah satu tujuan untuk meningkatkan suatu pembangunan di desa tersebut.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas bahwa bisa dikatakan partisipasi perempuan dalam pembangunan masih kurang sehingga peningkatan dalam pembangunan masih belum berjalan dengan baik dalam segi partisipasinya masyarakat di desa Babusalam. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk membahas rencana penelitian mengenai “Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan Desa, Studi Kasus Desa Babusalam Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas maka rumusan masalah yang dapat diambil yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah partisipasi perempuan dalam pembangunan di Desa Babusalam Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat tahun 2019?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi perempuan dalam pembangunan di Desa Babusalam Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana partisipasi perempuan dalam pembangunan desa di Desa Babusalam Kecamatan Gerung.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi partisipasi perempuan di Desa Babusalam Kecamatan Gerung.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat akademis

Secara akademis merupakan salah satu syarat mendapatkan gelar sarjana setara satu (S1) di fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Muhammadiyah Mataram. Selain itu untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, menambah pembendaharaan koleksi laporan hasil penelitian dalam bentuk skripsi dan memberikan kontribusi pemikiran serta untuk perkembangan ilmu ke depannya. Manfaat akademis yang dapat di ambil dalam penelitian ini yaitu, dapat menjadi acuan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mataram untuk sebagai bahan penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan partisipasi perempuan dalam pembangunan desa.

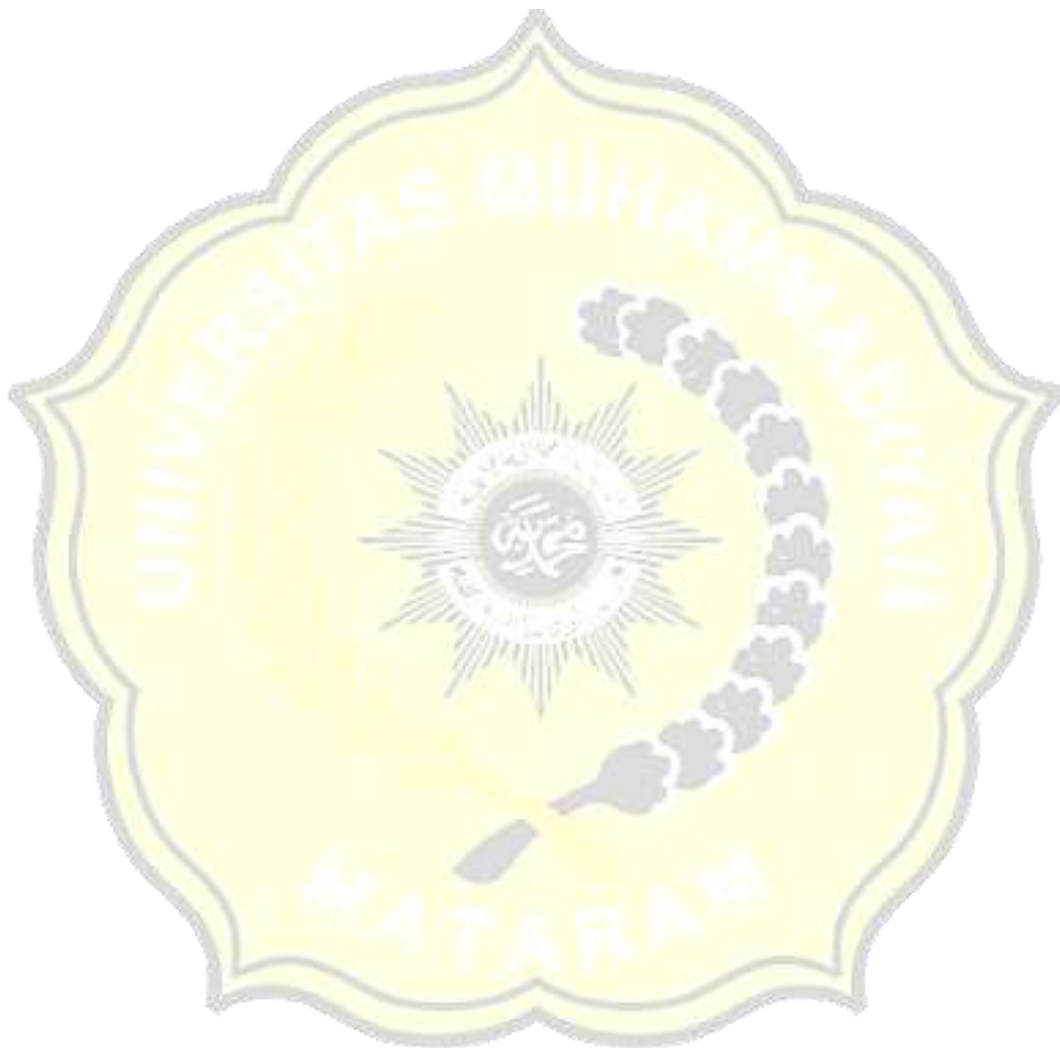
2. Manfaat teoritis

Adapun manfaat dan kegunaan penelitian ini secara teoritis untuk dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan serta menjadi referensi bagi peneliti yang berkeinginan melakukan penelitian tentang partisipasi perempuan dalam pembangunan desa juga menjadi masukan bagi pihak-pihak terkait terutama pada masyarakat serta menjadi motivasi bagi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan.

3. Manfaat praktis

- a. Bagi perempuan diharapkan dapat memotivasi untuk terlibat dalam pembangunan desa sehingga kaum perempuan dapat mendapatkan kontribusi dalam peningkatan pembangunan desa.

- b. Bagi organisasi diharapkan penelitian ini menjadi masukan dalam mencapai tujuan pembangunan desa. Hasil ataupun temuan di lapangan dapat di jadikan pedoman dalam mengembangkan pembangunan desa.



BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Adapun tulisan atau penelitian yang hampir sama atau bahkan mirip dengan judul penelitian ini adalah sebagai berikut:

“Yuanita Farah Monica dan Luluk Fauziah, Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan Desa Di Kecamatan Cand Kabupaten Sidoarjo, 2017”.Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan partisipasi perempuan dalam pembangunan Jambangan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Hasil dari penelitian ini yaitu partisipasi dan keterlibatan perempuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Desa Jambangan cukup besar, meskipun di dalam pemerintah desa tidak ada anggota perempuannya. Bentuk partisipasi yang dapat diberikan yakni berupa pikiran, dana, tenaga, kas swadaya, dan sebagainya. Termasuk juga dalam kegiatan pembangunan fisik, kegiatan-kegiatan social, ekonomi, dan keagamaan. Sedangkan pada evaluasi dan pemantauan pembangunan desa partisipasi dan keterlibatan perempuan belum maksimal, meskipun di desa Jambangan telah memiliki sarana pengaduan pada masing-masing wilayah namun sampai saat ini saran dan kritik dari perempuan masih kurang. Kendala partisipasi perempuan dalam pembangunan di desa Jambangan diantaranya waktu, dana dan pengetahuan dari perempuan itu sendiri mengenai partisipasi dalam pembangunan di desa Jambangan.

“Pratitisi Offi Agnes, dkk, Partisipasi Perempuan Dalam Perencanaan Pembangunan Desa, 2016”. Pada penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan desa serta faktor-faktor pendorong dan penghambat partisipasi perencanaan pembangunan desa yang dilakukan di desa Pilai Gading Kecamatan Banyur Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah tingkat partisipasi perempuan di desa pulau tergolong rendah dan jenis partisipasi berupa tenaga, pikiran, dan keahlian sedangkan pendorong partisipasi perempuan ada dua yaitu secara internal kemauan dan secara kemampuan, dan faktor eksternal yaitu pengaruh orang lain dan kebijakan pemerintah. Sedangkan penghambat internal rendahnya pendidikan dan tingkat ekonomi yang kurang dan faktor eksternal adalah rendahnya perempuan mengakses informasi pembangunan desa, dan faktor sosial budaya perempuan.

“Andi Nurhalimah, Partisipasi Kaum Perempuan dalam Perencanaan Pengelolaan Dana Desa, 2018”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana partisipasi perempuan dalam perencanaan dan pengelolaan dana Desa Berakit. Informan dalam penelitian ini sebanyak 20 (dua puluh) narasumber berasal dari 3 (tiga) orang pemerintah desa, 5 (lima) PKK, 3 (tiga) orang posyandu, 8 RT dan satu orang KUBE. Metode penelitian yang digunakan ialah metode deskriptif pendekatan kualitatif. Instrumen penelitian yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam

perencanaan dan pengelolaan dana desa pada desa berakit terdapat pada tingkatan *delegated power, placation* dan *consultation*. Yang di dominan pada kelompok besar *tokenisem* yaitu suatu tingkatan partisipasi masyarakat didengar dan diperkenankan berpendapat, tetapi mereka tidak boleh memiliki kemampuan untuk mendapat jaminan bahwa pandangan mereka itu di pertimbangkan oleh pemegang kekuasaan. Dan dilihat dari pemanfaatan penggunaan anggaran dana desa terhadap kesetaraan gender pada Desa Berakit tidak efektif dan efisien dikatakan tidak efektif karena pemilihan jenis pelatihannya di mana pada kuliner berbahan mangrove bahan yang digunakan susah dicari. dan tidak evisyen dikarenakan danana yang dikeluarkan dengan jumlah besar tapi tidak ada hasil yang didapatkan kembali (*outcome*).

“Hunia Djumati, dkk, Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan Desa Di Kecamatan Kao Utara, Kabupaten Halmahera Utara, 2009”. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Partisipasi perempuan dalam pembangunan desa di Kecamatan kao Utara. Partisipasi perempuan dalam pembangunan desa di Kecamatan kao Utara cukup baik dan signifikan. Partisipasi yang mendukung pembangunan itu dapat dilihat dalam kualitas capaian indikator, yakni dalam hal cakupan yang terkena dampak dari hasil-hasil keputusan atau proses pembangunan, semua orang terlibat dalam proses proyek pembangunan desa di kecamatan Kao Utara tanpa membedakan jenis kelamin. Ukuran partisipasi perempuan dalam pembangunan dapat dilihat secara nyata dalam peran kaum perempuan dalam berbagai bidang kehidupan, diantaranya adalah dalam bidang sosial, dalam

bidang adat dan lingkungan, politik dan pemerintahan, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, dan dalam bidang olahraga, kesenian dan pariwisata cukup baik dan signifikan. Partisipasi yang mendukung pembangunan itu dapat dilihat dalam kualitas capaian indikator, yakni: Dalam hal cakupan yang terkena dampak dari hasil-hasil keputusan atau proses pembangunan, semua orang terlibat dalam proses proyek pembangunan desa di kecamatan Kao Utara tanpa membedakan jenis kelamin.

“Abdul Muttalib, Studi Deskriptif Pran Perempuan Dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif Di Kota Mataram, 2018”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk partisipasi perempuan dalam Musrenbang/ MPBM Tingkat Kota Mataram untuk menganalisis yang mempengaruhi tingkat peranan perempuan dalam Musrenbang/MPBM Tingkat Kota Mataram. Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan menekankan pada pembangunan naratif dan deskripsi tekstual atau fenomena yang akan diteliti.. Hasil penelitian menunjukan bahwa Musrenbang Kota Mataram diselenggarakan berdasarkan Peraturan Walikota Mataram No 8 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 27 tahun 2001 tentang Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat, pelaksanaan Musrenbang yang dilaksanakan di Kota Mataram tahun 2017 berjalan sesuai dengan peraturan Walikota Mataram. Kehadiran perempuan di kota mataram belum mencapai kota minimal 30% dari jumlah peserta, keterlibatan perempuan dalam komisi fisik dan prasarana (0%), komisi umum (11,8%), komisi ekonomi (11,8%) dan komisi

sosial budaya (21,1%.) akses perempuan dalam Musrenbang Kota Mataram tahun 2017 melalui sidang komisi paling banyak berada di komisi sosial budaya karena keahlian perempuan lebih dimanfaatkan dalam komisi sosial budaya dibandingkan dengan komisi yang lainnya. Minimnya tingkat keterlibatan perempuan dalam Musrenbang Kota Mataram tahun 2017 disebabkan oleh beberapa faktor: Beban kerja domestik yang menimbulkan beban ganda bagi perempuan yang hendak beraktifitas publik, masyarakat yang telah meyakini bahwa perempuan identik dengan domestik maka menjadi wajar jika banyak perempuan yang enggan untuk mengikuti aktifitas di forum public. Musrenbang rendahnya pendidikan perempuan yang berakibat tidak siapnya perempuan memasuki wilayah-wilayah publik yang kompetitif dan maskulin, aktifitas publik seperti waktu rapat yang mempertimbangkan kebutuhan perempuan.

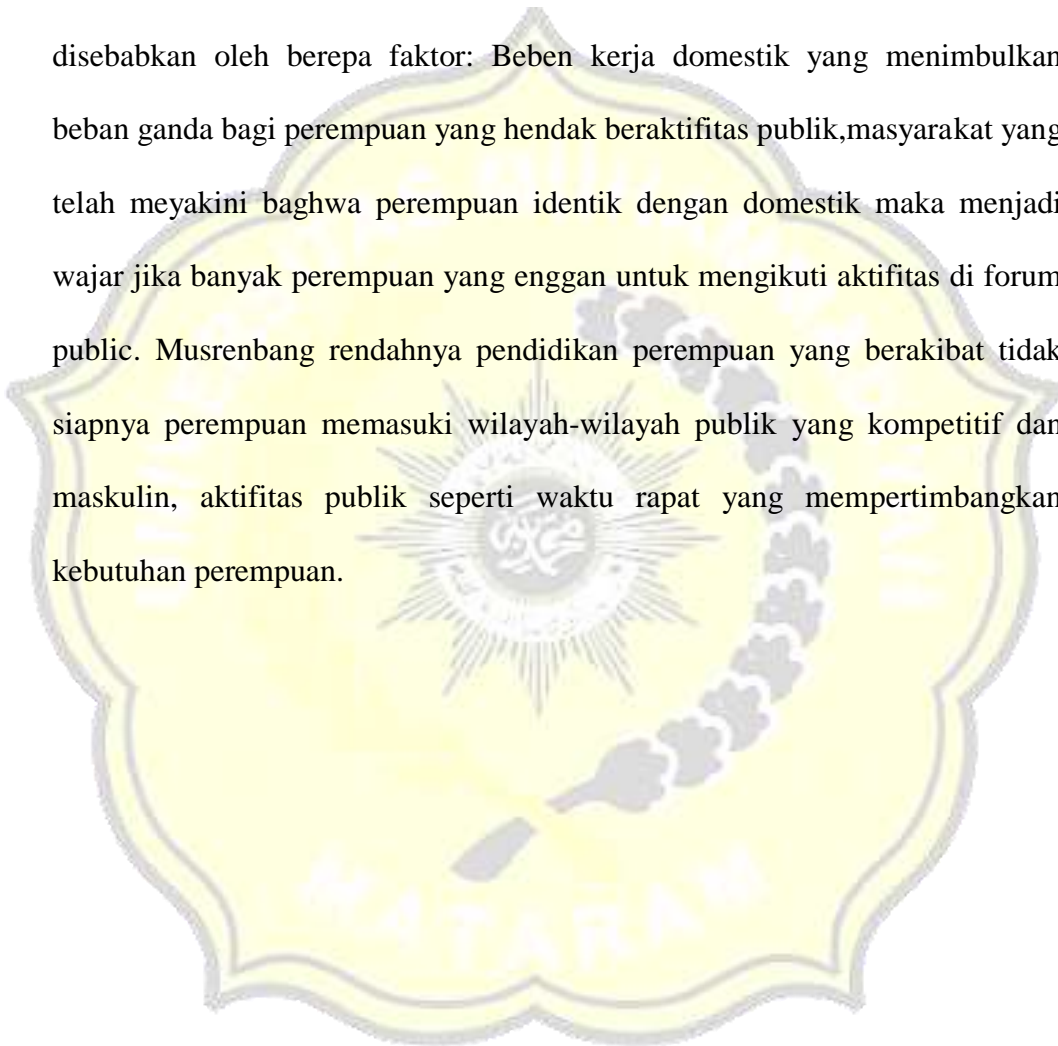


Table 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul/Tahun	Hasil Penelitian
1	Yuanita Farah Monica dan Luluk Fauziah	Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan Desa Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, 2017.	Partisipasi dan keterlibatan perempuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan cukup besar meskipun didalam anggota pemerintahan desa tidak ada anggota perempuannya, bentuk partisipasi yang di berikan berupa pikiran, dana, tenaga, kas swadaya dan sebagainya.
2	Agnes, Diana Dewi Sartika, dan Yunindiawati	Partisipasi Perempuan Dalam Perencanaan Pembangunan Desa, 2016.	Tingkat partisipasi perempuan di desa pulai ini tergolong rendah dengan jenis partisipasi berupa pikiran, tenaga,pikiran dan tenaga dan keahlian.
3	Andi Nurhalimah	Partisipasi Kaum Perempuan Dalam Perencanaan Pengelolaan Dana Desa, 2018.	Menujukan bahwa partisipasi perempuan dalam perencanaan dan pengelolaan dana desa di desa brakit terdapat pada tingkat delegatd power, placation dan consultation yang domin pada kelompok besar tokenisme yaitu suatu

			tingkat partisipasi di masyarakat di dengar dan di perkenalkan pandangan mereka itu di pertimbangkan oleh pemegang kekuasaan.
4	Hunia Djumati , Wilson Y. Rompas dan A. J. Rorong	Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan Desa Di Kecamatan Kao Utara, Kabupaten Halmahera Utara, 2009.	Partisipasi perempuan dalam pembangunan desa di Kecamatan kao Utara cukup baik dan signifikan. Partisipasi itu dapat dilihat dalam kualitas capaian indikator, yakni: Dalam hal cakupan yang terkena dampak dari hasil-hasil keputusan atau proses pembangunan, semua orang terlibat dalam proses proyek pembangunan desa di kecamatan Kao Utara tanpa membedakan jenis kelamin.
5	Abdul Muttalib	Studi Deskriptif Pran Perempuan Dalam Perencanaan Pembangunan Pembangunan Partisipatif Di Kota Mataram, 2018.	Tentang musyawarah pembangunan bemitra masyarakat pelaksanaan Musrenbang yang di laksanakan di kota mataram komisi-komisi sosial budaya yang paling banyak di hadiri oleh perempuan

			karena keahlian perempuan lebih di manfaatkan dalam komisi sosial budaya.
--	--	--	---

Persamaan antara penelitian yang diangkat oleh peneliti dengan beberapa penelitian terdahulu di atas adalah adanya memiliki persamaan meneliti mengenai partisipasi perempuan dalam pembangunan di suatu desa. Kemudian yang menjadi perbedaannya yaitu seperti, terdapat beberapa teori yang digunakan untuk menunjang fokus penelitiannya. Selain itu juga, adanya pemfokusan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini berbeda-beda, misalnya dalam penelitian terdahulu di atas ini lebih menonjol kearah permasalahan mengenai pengelolaan dana desa dalam kegiatan pembangunan, serta partisipasi perempuan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), sedangkan pada penelitian yang diangkat oleh peneliti ini lebih mempersempit permasalahannya mengenai tingkat partisipasinya perempuan dalam suatu kegiatan pembangunan desa. Dan perbedaan yang lainnya seperti metode penelitian yang digunakan yaitu ada yang menggunakan kualitatif maupun kuantitatif. Itulah beberapa persamaan dan perbedaan yang signifikan terhadap penelitian terdahulu dengan penelitian yang diangkat oleh peneliti dan hal tersebut menjadi referensi atau panduan dalam penyusunan penelitian ini.

2.2 Pembangunan

1.2.1 Konsep Pembangunan

Pembangunan merupakan proses peningkatan dan pertumbuhan seimbang pada segala aspek kehidupan, baik aspek sosial, ekonomi, politik,

budaya, pemerintahan, pertahanan keamanan maupun aspek ideologi. Pembangunan juga sebagai satu proses menuju ke arah yang lebih baik. Proses tersebut dalam rangka pencapaian hakekat tujuan pembangunan nasional yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur serta sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tjokroamidjojo dan Musropadidjaja (1998) memberikan definisi bahwa pembangunan adalah terjadinya suatu perubahan pada nilai-nilai ekonomi, sosialbudaya, dan politik. Pembangunan adalah orientasi atau kegiatan usaha tanpa akhir, lebih lanjut dijelaskan bahwa proses pembangunan sebenarnya adalah suatu proses perubahan sosial budaya. Supaya menjadi suatu proses yang dapat bergerak maju atas kekuatan sendiri tergantung pada manusia dan struktur sosialnya.

Siagian (1996) mengemukakan bahwa pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana serta dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembangunan bangsa. Sedangkan Mansour (2002) menyatakan bahwa pembangunan dapat diinterpretasikan dalam dua kategori berdasarkan pengertian yaitu:

1. Pembangunan sebagai fenomena sosial yang mencerminkan kemajuan peradaban manusia.
2. Pembangunan dapat diartikan sebagai perubahan sosial yang terencana.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa untuk terlaksananya pembangunan diseluruh daerah dengan benar sesuai tujuan yang akan dicapai harus dimulai dengan perencanaan yaitu: (a) Mengadakan penelitian sumber-sumber yang

dibutuhkan dana tersedia bagi pembangunan, khususnya sumber pembiayaan dan tenaga-tenaga yang penting untuk sektor-sektor prioritas; dan (b) Menyusun suatu kebijakan pembangunan yang konsisten guna mendukung pelaksanaan pembangunan dan tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan.

Dampak dari partisipasi masyarakat secara langsung dalam proses pembangunan menurut Abe (dalam, Fadil, 2013) adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat akan terhindar dari peluang manipulasi keterlibatan masyarakat secara langsung akan memperjelas apa yang sebetulnya dikehendaki masyarakat.
2. Memberikan nilai tambah pada legitimasi rumusan perencanaan program masyarakat.
3. Meningkatkan kesadaran dan keterampilan politik masyarakat.

Pada dasarnya, pengertian pembangunan secara umum merupakan suatu proses perubahan yang akan terus menerus untuk dapat menuju ke keadaan yang akan lebih baik yang berdasarkan suatu norma-norma tertentu. Dalam pengertian pembangunan, para ahli lalu kemudian banyak memberikan penjelasan yang juga bermacam-macam sama dengan halnya dengan perencanaan.

Istilah pembangunan dapat juga didefinisikan maupun juga diberikan pengertian yang berbeda-beda oleh satu orang dengan orang yang lain, negara satu dengan negara yang lainnya. Namun pada umum terdapat kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan. Pembangunan merupakan suatu seperangkat usaha yang terencana atau terarah dalam dapat menghasilkan sesuatu yang dapat dimanfaatkan dalam memenuhi

suatu kebutuhan atau juga dapat meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Menurut Effendi (2002:2) pembangunan adalah “suatu upaya meningkatkan segenap sumber daya yang dilakukan secara berencana dan berkelanjutan dengan prinsip daya guna yang merata dan berkeadilan”. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pembangunan berorientasi pada pembangunan masyarakat, dimana pendidikan menempati posisi yang utama dengan tujuan untuk membuka wawasan dan kesadaran warga akan arah dan cita-cita yang lebih baik

Seymour Martin Lipset Dalam bukunya ”*Political Man: The Social Bases of Politics*” (1960), Lipset berpendapat bahwa beberapa faktor sosial dan organisasional diperlukan untuk mencapai negara yang demokratis. Beberapa faktor tersebut antara lain: industrialisasi, urbanisasi, pendidikan tinggi, dan angka kekayaan yang tinggi. Untuk mencapai tahap kedewasaan demokrasi, Lipset menambahkan pertumbuhan ekonomi dan legitimasi sebagai dua faktor utamanya.

Menurut Riady dan Supriady (2005:3:22), terdapat langkah-langkah di dalam mengajak peran serta masyarakat secara penuh di dalam pembangunan dapat dilakukan dengan cara:

- a. Merumuskan dan menampung keinginan masyarakat yang akan diwujudkan melalui upaya pembangunan.
- b. Dengan dibantu oleh pendamping atau narasumber atau lembaga perhimpunan masyarakat dibuatkan alternative perumusan dari berbagai keinginan tersebut.

- c. Merancang pertemuan seluruh masyarakat yang berminat dan berkepentingan, yang membicarakan cost dan benefit dipelaksanaan pembangunan ini.
- d. Memilih tokoh masyarakat atau perwakilan masyarakat turut serta dalam proses selanjutnya.
- e. Proses perencanaan program pembangunan dan pembiayaan pembangunan serta rencana pelaksanaan pembangunan dilangsungkan beberapa kali dan melibatkanseluruh instansi maupun pemeran pembangunan yang terkait, disamping tokoh atau wakil masyarakat dan DPRD.
- f. Mendapatkan sejumlah usulan program pembangunan yang sudah disepakati.
- g. Melaksanakan program pembangunan, disertai dengan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan.

Menurut Deddy T. Tikson (2005) bahwa pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan. Transformasi dalam struktur ekonomi, misalnya, dapat dilihat melalui peningkatan atau pertumbuhan produksi yang cepat di sektor industri dan jasa, sehingga kontribusinya terhadap pendapatan nasional semakin besar. Sebaliknya, kontribusi sektor pertanian akan menjadi semakin kecil dan berbanding terbalik dengan pertumbuhan industrialisasi dan modernisasi ekonomi. Transformasi sosial dapat dilihat melalui pendistribusian kemakmuran melalui pemerataan memperoleh akses terhadap sumber daya sosial-ekonomi, seperti pendidikan, kesehatan,

perumahan, air bersih, fasilitas rekreasi, dan partisipasi dalam proses pembuatan keputusan politik. Sedangkan transformasi budaya sering dikaitkan, antara lain, dengan bangkitnya semangat kebangsaan dan nasionalisme, disamping adanya perubahan nilai dan norma yang dianut masyarakat, seperti perubahan dan spiritualisme ke materialisme/sekularisme. Pergeseran dari penilaian yang tinggi kepada penguasaan materi, dari kelembagaan tradisional menjadi organisasi modern dan rasional.

Dengan demikian, proses pembangunan terjadi di semua aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial, budaya, politik, yang berlangsung pada level makro (nasional) dan mikro (*community/group*). Makna penting dari pembangunan adalah adanya kemajuan/perbaikan (*progress*), pertumbuhan dan diversifikasi. Sebagaimana dikemukakan oleh para ahli di atas, *pembangunan* adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Sedangkan perkembangan adalah proses perubahan yang terjadi secara alami sebagai dampak dari adanya pembangunan (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005).

Dengan semakin meningkatnya kompleksitas kehidupan masyarakat yang menyangkut berbagai aspek, pemikiran tentang modernisasi pun tidak lagi hanya mencakup bidang ekonomi dan industri, melainkan telah merambah ke seluruh aspek yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, “modernisasi diartikan sebagai proses transformasi dan perubahan dalam masyarakat yang meliputi segala aspeknya, baik ekonomi, industri, sosial, budaya, dan sebagainya”.

Oleh karena dalam proses modernisasi itu terjadi suatu proses perubahan yang mengarah pada perbaikan, para ahli manajemen pembangunan menganggapnya sebagai suatu proses pembangunan di mana terjadi proses perubahan dari kehidupan tradisional menjadi modern, yang pada awal mulanya ditandai dengan adanya penggunaan alat-alat modern, menggantikan alat-alat yang tradisional.

2.2.2 Tujuan Pembangunan

Menimbang banyaknya aspek harus dibangunnya, maka pembangunan seringkali dilakukan akan secara bertahap. Tahapan pembangunan tersebut tidak dapat di sesuaikan dengan adanya skala yang akan diutamakan. Pembangunan tersebut menyangkut kepentingan yang akan didahulukan.

Adapun tujuan pembangunan Indonesia yang tersirat. pada umumnya suatu terdapat dalam pembukaan UUD 1945 yang dimana tujuan pembangunan merupakan sebagai berikut yakni:

- a. Melindungi segenap bangsa atau jumlah seluruh tumpah darah Indonesia
- b. Memajukan kesejahteraan umum
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa
- d. Ikut dalam melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan juga keadilan sosial.

2.2.3 Ciri-Ciri Pembangunan

Perencanaan dimana pembangunan tersebut harus direncanakan dalam setiap tahap-tahap dari pembangun, dari hal tersebut,yang akan dibutuhkan sebuah pembangunan berkelanjutan yang akan mempertibangkan berbagai

aspek khususnya lingkungan hidup. Olehnya, terdapat ciri-ciri pembangunan yang memperhatikan berbagai aspek yang dapat dilihat dibawah ini.

- a. Menjamin dalam pemerataan atau juga keadilan.
- b. Strategi pembangunan yang akan berkelanjutan yang dilandasi oleh pemerataan distribusi sumber lahan atau faktor produksi,
- c. pemerataan kesempatan bagi perempuan, atau juga pemerataan ekonomi demi peningkatakn kesejahteraan.

2.2.3 Indikator Pengukuran Keberhasilan Pembangunan

Penggunaan indikator dan variabel pembangunan bisa berbeda untuk setiap Negara. Di Negara-negara yang masih miskin, ukuran kemajuan dan pembangunan mungkin masih sekitar kebutuhan-kebutuhan dasar seperti listrik masuk desa, layanan kesehatan pedesaan, dan harga makanan pokok yang rendah. Sebaliknya, di Negara-negara yang telah dapat memenuhi kebutuhan tersebut, indicator pembangunan akan bergeser kepada factor-faktor sekunder dan tersier (Tikson, 2005).

Sejumlah indikator ekonomi yang dapat digunakan oleh lembaga-lembaga internasional antara lain pendapatan perkapita (GNP atau PDB), struktur perekonomian, urbanisasi, dan jumlah tabungan. Disamping itu terdapat pula dua indicator lainnya yang menunjukkan kemajuan pembangunan sosial ekonomi suatu bangsa atau daerah yaitu Indeks Kualitas Hidup (IKH atau PQLI) dan Indeks Pembangunan Manusia (HDI). Berikut ini, akan disajikan ringkasan Deddy T. Tikson (2005) terhadap kelima indicator tersebut :

1. Pendapatan Perkapita

Pendapatan per kapita, baik dalam ukuran GNP maupun PDB merupakan salah satu indikator makro-ekonomi yang telah lama digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Dalam perspektif makroekonomi, indikator ini merupakan bagian kesejahteraan manusia yang dapat diukur, sehingga dapat menggambarkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Tampaknya pendapatan per kapita telah menjadi indikator makroekonomi yang tidak bisa diabaikan, walaupun memiliki beberapa kelemahan. Sehingga pertumbuhan pendapatan nasional, selama ini, telah dijadikan tujuan pembangunan di negara-negara dunia ketiga.

2. Struktur ekonomi

Telah menjadi asumsi bahwa peningkatan pendapatan per kapita akan mencerminkan transformasi struktural dalam bidang ekonomi dan kelas-kelas sosial. Dengan adanya perkembangan ekonomi dan peningkatan per kapita, kontribusi sektor manufaktur/industri dan jasa terhadap pendapatan nasional akan meningkat terus.

3. Urbanisasi

Urbanisasi dapat diartikan sebagai meningkatnya proporsi penduduk yang bermukim di wilayah perkotaan dibandingkan dengan di pedesaan. Urbanisasi dikatakan tidak terjadi apabila pertumbuhan penduduk di wilayah urban sama dengan nol. Sesuai dengan pengalaman industrialisasi di negara-negara eropa Barat dan Amerika Utara, proporsi

penduduk di wilayah urban berbanding lurus dengan proporsi industrialisasi.

4. Angka Tabungan

Perkembangan sector manufaktur/industri selama tahap industrialisasi memerlukan investasi dan modal. Finansial capital merupakan factor utama dalam proses industrialisasi dalam sebuah masyarakat, sebagaimana terjadi di Inggris pada umumnya Eropa pada awal pertumbuhan kapitalisme yang disusul oleh revolusi industri. Dalam masyarakat yang memiliki produktivitas tinggi, modal usaha ini dapat dihimpun melalui tabungan, baik swasta maupun pemerintah

5. Indeks Kualitas Hidup

IKH atau *Physical Quality of life Index* (PQLI) digunakan untuk mengukur kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Indeks ini dibuat indicator makroekonomi tidak dapat memberikan gambaran tentang kesejahteraan masyarakat dalam mengukur keberhasilan ekonomi. Misalnya, pendapatan nasional sebuah bangsa dapat tumbuh terus, tetapi tanpa diikuti oleh peningkatan kesejahteraan sosial. Indeks ini dihitung berdasarkan kepada (1) angka rata-rata harapan hidup pada umur satu tahun, (2) angka kematian bayi, dan (3) angka melek huruf. Dalam indeks ini, angka rata-rata harapan hidup dan kematian b yi akan dapat menggambarkan status gizi anak dan ibu, derajat kesehatan, dan lingkungan keluarga yang langsung beasosiasi dengan kesejahteraan keluarga. Pendidikan yang diukur dengan angka melek huruf, dapat

menggambarkan jumlah orang yang memperoleh akses pendidikan sebagai hasil pembangunan.

2.3 Partisipasi

1.3.1 Definisi partisipasi

Partisipasi adalah keterlibatan atau keikutsertaan seseorang atau kelompok dalam suatu kegiatan. Menurut Davis, dalam bukunya beliau menjelaskan bahwa definisi partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosional seseorang atau individu dalam situasi kelompok yang mendorong dia untuk berkontribusi terhadap tujuan kelompok dan mempertanggung-jawabkan keterlibatannya. Djajal dan Supriadi (dalam Yuwono, 2001:201-202) di dalam bukunya beliau menjelaskan bahwa makna partisipasi adalah pembuat keputusan dengan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, bahan, keterampilan, barang dan jasa.

H.A.R Tilaar (2009: 287) mengungkapkan partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (bottom-up) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya. Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007: 27) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya¹⁵ mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Mikkelsen (1999: 64) membagi partisipasi menjadi 6 (enam) pengertian, yaitu:

1. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa keputusan;
2. Partisipasi adalah “pemekaan” (membuat peka) pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan;
3. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri;
4. Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu;
5. Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampak dampak sosial;
6. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri kehidupan, dan lingkungan mereka. Dari beberapa pakar yang mengungkapkan definisi partisipasi di atas, dapat dibuat kesimpulan bahwa partisipasi adalah keterlibatan aktif dari seseorang, atau sekelompok orang (masyarakat) secara sadar untuk berkontribusi secara sukarela dalam program pembangunan dan terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai pada tahap evaluasi.

Apa yang ingin dicapai dengan adanya partisipasi adalah meningkatnya kemampuan (pemberdayaan) setiap orang yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam sebuah program pembangunan dengan cara melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya dan untuk jangka yang lebih panjang. Adapun prinsip-prinsip partisipasi tersebut, sebagaimana tertuang dalam Panduan Pelaksanaan Pendekatan Partisipatif yang disusun oleh *Department for International Development* (DFID) (dalam Monique Sumampouw, 2004) adalah:

1. Cakupan. Semua orang atau wakil-wakil dari semua kelompok yang terkena dampak dari hasil-hasil suatu keputusan atau proses proyek pembangunan.
2. Kesetaraan dan kemitraan (*Equal Partnership*). Pada dasarnya setiap orang mempunyai keterampilan, kemampuan dan prakarsa serta mempunyai hak untuk menggunakan prakarsa tersebut terlibat dalam setiap proses guna membangun dialog tanpa memperhitungkan jenjang dan struktur masing-masing pihak.
3. Transparansi. Semua pihak harus dapat menumbuhkembangkan komunikasi dan iklim berkomunikasi terbuka dan kondusif sehingga menimbulkan dialog.
4. Kesetaraan kewenangan (*Sharing Power/Equal Powership*). Berbagai pihak yang terlibat harus dapat menyeimbangkan distribusi kewenangan dan kekuasaan untuk menghindari terjadinya dominasi.

5. Kesetaraan Tanggung Jawab (*Sharing Responsibility*). Berbagai pihak mempunyai tanggung jawab yang jelas dalam setiap proses karena adanya kesetaraan kewenangan (*sharing power*) dan keterlibatannya dalam proses pengambilan keputusan dan langkah-langkah selanjutnya.
6. Pemberdayaan (*Empowerment*). Keterlibatan berbagai pihak tidak lepas dari segala kekuatan dan kelemahan yang dimiliki setiap pihak, sehingga melalui keterlibatan aktif dalam setiap proses kegiatan, terjadi suatu proses saling belajar dan saling memberdayakan satu sama lain.
7. Kerjasama. Diperlukan adanya kerja sama berbagai pihak yang terlibat untuk saling berbagi kelebihan guna mengurangi berbagai kelemahan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia

1.3.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi

Angell (Ross, 1967) menyatakan bahwa partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi, yaitu:

1. Faktor Kesadaran/Kemauan

Partisipasi yang timbul karena kehendak dari pribadi anggota masyarakat. Hal

ini dilandasi oleh dorongan yang timbul dari hati nurani sendiri.

2. Usia

Faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari kelompok usia

menengahke atas dengan keterikatan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi daripada mereka yang dari kelompok usia lainnya.

3. Jenis kelamin

Partisipasi yang diberikan oleh seorang pria dan wanita dalam pembangunan adalah berbeda. Hal ini disebabkan oleh adanya sistem pelapisan sosial yang terbentuk dalam masyarakat, yang membedakan kedudukan dan derajat ini, akan menimbulkan perbedaan-perbedaan hak dan kewajiban antara pria dan wanita.

4. Pendidikan

Dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. Pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.

5. Pekerjaan dan penghasilan

Hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan diperolehnya. Pekerjaan dan penghasilannya yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Pengertiannya bahwa untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, harus didukung oleh suasana yang mapan per ekonomian.

6. Lamanya tinggal

Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam lingkungan tertentu, maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut.

7. Adanya dukungan dari Pemerintah Daerah dan masyarakat Pemerintah selaku penganut amanat rakyat untuk membangun memanglah

harus berperan, terutama pemerintah daerah dalam hal ini Camat, mereka diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa, mendatangi masyarakat untuk menghibau dan usaha lainnya. Dukungan dari masyarakat, baik dari tokoh masyarakat maupun warga secara umum. Partisipasi tokoh masyarakat turut membantu dalam mengawasi dan memberikan arahan kepada masyarakat yang kurang memahami tentang pembangunan desa serta berperan sebagai kontrol sosial di tengah masyarakat.

8. Peralatan/Fasilitas

Dalam pelaksanaan tugas kepala Kecamatan dan perangkatnya, dibutuhkan kantor Kecamatan yang merupakan tempat untuk melaksanakan tugas pengelolaan, pelaporan, pencatatan dan berbagai kegiatan lainnya.

2.1 Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat

Ndraha (1994) mengemukakan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yaitu sebagai berikut.

1. Partisipasi melalui kontak dengan pihak lain.
2. Partisipasi dalam memperhatikan atau menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi.
3. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan, termasuk pengambilan keputusan.
4. Partisipasi dalam pelaksanaan organisasional pembangunan.
5. Partisipasi dalam menerima, memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan. Partisipasi dalam menilai pembangunan.

2.2 Tujuan Partisipasi Masyarakat

Perhatian terhadap arti pentingnya peran serta masyarakat untuk keberhasilan pembangunan muncul sebagai akibat pergeseran orientasi pembangunan dari capital investment growth model pada tahun 1960-an ke orientasi people centered basic needs approach pada tahun 1970-an. Perubahan orientasi pembangunan tersebut bertolak dari kenyataan bahwa golongan miskin dalam pembangunan ekonomi tidak banyak terangkat dalam kemajuan pembangunan.

Selanjutnya timbullah perhatian terhadap strategi pembangunan lainnya yaitu pembangunan yang bukan hanya mencakup soal pemerataan, tetapi juga mengatasi kemiskinan. Salah satu model pembangunan yang berbasis masyarakat ini dilaksanakan dengan cara memadukan antara peran pemerintah

dan peran serta masyarakat secara serasi dan proporsional. Tujuan pembangunan model ini adalah antara lain untuk:

1. meningkatkan produksi dan produktivitas;
2. meningkatkan pemerataan dalam memperoleh sumber pendapatan, jasa pemerintahan, dan pelayanan publik; menyediakan kesempatan kerja;
3. meningkatkan harga diri dan kepercayaan diri
4. menumbuhkan keterlibatan masyarakat secara genuine;
5. mempertegas titik keseimbangan dalam pengelolaan sumber daya alam antara.
6. pemanfaatan dan pelestarian.

Bahkan oleh Slamet M., ditegaskan bahwa peran serta masyarakat sangat mutlak demi berhasilnya pembangunan. Tanpa peran serta masyarakat, khususnya dalam memanfaatkan hasil pembangunan, berarti masyarakat tidak menerima peningkatan kesejahteraan, padahal pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan. Untuk itu, tanpa peran serta masyarakat, maka setiap proyek pembangunan harus dinilai tidak berhasil.

Dengan demikian peran serta masyarakat adalah sebagai bagian sentral dalam strategi pembangunan yang moderen dan demokratis. Bila masyarakat mulai berperan serta dalam seluruh aspek pembangunan, baik pada proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemantauan, pengawasan, evaluasi, maupun pada tahap penerimaan manfaat, maka dengan demikian asumsinya adalah bahwa tujuan-tujuan pembangunan itu pun seyogianya akan tercapai pula.

2.4 Partisipasi Perempuan

2.4.1 Definisi Partisipasi Perempuan

Dalam Fitriana (2008: 34) perbedaan makna kata wanita dan perempuan dalam konteks kebahasaan sehari-hari memang belum jelas, apalagi bagi kaum awam. Untuk mendudukan posisi tiap kata, kapan orang seharusnya menggunakan kata wanita dan kapan seharusnya orang menggunakan kata perempuan, perlu penelaahan secara mendalam. Dalam pandangan masyarakat Indonesia, kata perempuan mengalami degradasi semantik, atau peyorasi, yakni penurunan nilai makna kata, dimana makna kata sekarang lebih rendah daripada makna kata yang dahulu.

Pengertian khusus tentang perempuan identik dengan pembedaan jenis kelamin secara biologis. Dalam Nugroho (2008: 2) disebutkan bahwa: "Perempuan merupakan manusia yang memiliki alat reproduksi, seperti rahim, dan saluran untuk melahirkan, mempunyai sel telur, memiliki vagina, dan mempunyai alat untuk menyusui, yang semuanya secara permanen tidak berubah dan mempunyai ketentuan biologis atau sering dikatakan sebagai kodrat (ketentuan Tuhan)."

Hal serupa dikemukakan oleh Sulaeman dan Homzah (2010) dalam sudut pandang biologis, perempuan seringkali diidentikan dengan bejana yang mudah pecah seperti, halus, lemah dan tidak berdaya. Secara cultural berdasarkan Nugroho, perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional dan keibuan. Sedangkan dalam tinjauan etimologi berdasarkan Sudarwati dan Jupriono kata perempuan bernilai cukup tinggi, tidak dibawah tetapi sejajar,

bahkan lebih tinggi daripada kata lelaki. Hal ini bisa dilihat dari uraian singkat di bawah ini:

1. Secara etimologis, kata perempuan berasal dari kata empu yang berarti tuan, orang yang mahir/berkuasa, atau pun kepala, hulu, atau yang paling besar.
2. Kata perempuan juga berhubungan dengan kata ampu sokong, memerintah, penyangga, penjaga keselamatan, bahkan wali; kata mengampu artinya menahan agar tidak jatuh atau menyokong agar tidak runtuh; kata mengampukan berarti memerintah (negeri); ada lagi pengampu yakni penahan, penyangga, penyelamat.
3. Kata perempuan juga berakar erat dari kata empuan; kata ini mengalami pemendekan menjadi puan yang artinya sapaan hormat pada perempuan, sebagai pasangan kata tuan yang merupakan sapaan pada lelaki.

2.4.2 Konsep Partisipasi Perempuan

Partisipasi/keterlibatan masyarakat sangat diperlukan dalam pembangunan, khususnya dalam program pembangunan. Namun bukan partisipasi/keterlibatan dalam arti masyarakat ikut mendukung secara mutlak program yang direncanakan oleh pemerintah dan ikut dalam melaksanakan kegiatan dalam program yang direncanakan oleh pemerintah. Akan tetapi partisipasi/keterlibatan yang ditekankan disini adalah dalam arti masyarakat ikut berpartisipasi/keterlibatan dalam pembuatan keputusan, perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan, dan evaluasi serta turut bertanggungjawab.

Penelitian ini lebih cenderung untuk mengadopsi pemahaman partisipasi menurut logika pemberdayaan, (Lund, S, 1990:178-179).

Lebih rinci Cohen dan Uphoff (Irene, 2011: 61) membedakan partisipasi menjadi empat jenis yaitu: Pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan manfaat. Dan keempat, partisipasi dalam evaluasi. Pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat yang berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Dalam partisipasi ini masyarakat menuntut untuk ikut menentukan arah dan orientasi pembangunan. Wujud dari partisipasi ini antara lain seperti kehadiran rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan suatu program meliputi: menggerakkan sumber daya, dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi ini tidak lepas dari hasil pelaksanaan program yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kuantitas maupun kualitas. Dari segi kualitas, dapat dilihat dari peningkatan output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat seberapa besar prosentase keberhasilan program. Keempat, partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi masyarakat dalam evaluasi ini berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang telah direncanakan sebelumnya.

Dengan demikian maka lebih besar kemungkinannya suatu program kemiskinan itu berhasil, walaupun masih banyak hambatan untuk mewujudkan partisipasi/keterlibatan itu sendiri. Ikhsan Muharma Putra / Kafa'ah : Jurnal Ilmiah Kajian Gender Perempuan menjadi salah satu sasaran penting pembedayaan masyarakat. Pemberdayaan perempuan merupakan salah satu titik masuk untuk pemberdayaan masyarakat dalam mengurangi kemiskinan. Gerakan emansipasi wanita menempatkan perempuan menjadi posisi central.

2.4.3 Analisis Gender Perspektif Longwe

Kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan analisis Longwe. Pendekatan analisis Longwe (Sara Hlupekile Longwe) atau biasa disebut dengan Kriteria Pembangunan Perempuan (Women's Empowerment Criteria atau Women's Development Criteria), adalah suatu pendekatan analisis yang dikembangkan sebagai metode pemberdayaan perempuan dengan lima kriteria analisis yang meliputi : kesejahteraan, akses, kesadaran kritis, partisipasi, dan kontrol. Lima dimensi pemberdayaan ini adalah kategori analitis yang bersifat dinamis, satu sama lain berhubungan secara sinergis, saling menguatkan dan melengkapi, serta mempunyai hubungan hierarkhis. Disamping itu kelima dimensi tersebut juga merupakan tingkatan yang bergerak memutar seperti spiral, makin tinggi tingkat kesetaraan otomatis makin tinggi tingkat keberdayaan (Handayani, 2002:180).

a. Dimensi Kesejahteraan

Dimensi ini merupakan tingkat kesejahteraan material yang diukur dari tercukupinya kebutuhan dasar seperti makanan, penghasilan, perumahan, dan kesehatan yang harus dinikmati oleh perempuan dan laki-laki. Dengan demikian kesenjangan gender ditingkat kesejahteraan ini diukur melalui perbedaan tingkat kesejahteraan perempuan dan laki-laki sebagai kelompok, untuk masing-masing kebutuhan dasarnya. Pemberdayaan tidak dapat terjadi dengan sendirinya ditingkat ini, melainkan harus dikaitkan dengan peningkatan akses terhadap sumber daya yang merupakan dimensi tingkat kedua. Level ini merupakan tingkatan nihil dari pemberdayaan perempuan. Padahal upaya untuk memperbaiki kesejahteraan perempuan diperlukan keterlibatan perempuan dalam proses empowerment dan pada tingkat pemerataan yang lebih tinggi.

b. Dimensi Akses

Kesenjangan gender di sini terlihat dari adanya perbedaan akses antara laki-laki dan perempuan terhadap sumber daya. Lebih rendahnya akses mereka terhadap sumber daya menyebabkan produktivitas perempuan cenderung lebih rendah dari laki-laki. Selain itu dalam banyak komunitas, perempuan diberi tanggung jawab melaksanakan hampir semua pekerjaan domestik sehingga tidak mempunyai cukup waktu untuk mengurus dan meningkatkan kemampuan dirinya. Pembangunan perempuan tidak cukup hanya pada pemerataan akses karena kurangnya akses perempuan bukan saja merupakan isu gender tetapi akibat dari diskriminasi gender. Oleh

karena itu akar penyebab kesenjangan akses atas sumber daya adalah diskriminasi sistemik yang harus diatasi melalui penyadaran.

c. Dimensi kesadaran kritis

Kesenjangan gender ditingkat ini disebabkan adanya anggapan bahwa posisi sosial ekonomi perempuan yang lebih rendah dari laki-laki dan pembagian kerja gender tradisional adalah bagian dari tatanan abadi. Pemberdayaan di tingkat ini berarti menumbuhkan sikap kritis dan penolakan terhadap cara pandang di atas: bahwa subordinasi terhadap perempuan bukanlah pengaturan alamiah, tetapi hasil diskriminatif dari tatanan sosial yang berlaku. Keyakinan bahwa kesetaraan gender adalah bagian dari tujuan perubahan merupakan inti dari kesadaran gender dan merupakan elemen ideologis dalam proses pemberdayaan yang menjadi landasan konseptual bagi perubahan ke arah kesetaraan.

d. Dimensi Partisipasi

Partisipasi aktif perempuan diartikan bahwa pemerataan partisipasi perempuan dalam proses penetapan keputusan yaitu partisipasi dalam proses perencanaan penentuan kebijakan dan administrasi. Aspek ini sangat penting pada proyek pembangunan. Di sini partisipasi berarti keterlibatan atau keikutsertaan aktif sejak dalam penetapan kebutuhan, formulasi proyek, implementasi dan monitoring serta evaluasi. Partisipasi dapat dibedakan menjadi partisipasi kuantitatif dan partisipasi kualitatif. Kesenjangan partisipasi perempuan mudah diidentifikasi, misalnya dari partisipasi di lembaga legislatif, eksekutif, organisasi, politik, dan massa.

Namun partisipasi secara umum dapat dilihat dari adanya peran serta setara antara laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan, baik ditingkat keluarga, komunitas, masyarakat maupun negara. Di tingkat program, ini berarti dilibatkannya perempuan dan laki-laki secara setara dalam identifikasi masalah, perencanaan, pengelolaan, implementasi dan monitoring evaluasi. Meningkatnya peran serta perempuan merupakan hasil dari pemberdayaan sekaligus sumbangan penting bagi pemberdayaan yang lebih besar.

e. Dimensi Kuasa/Kontrol

Kesenjangan gender di tingkat ini terlihat dari adanya hubungan kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Ini bisa terjadi di tingkat rumah tangga, komunitas, dan tingkatan yang lebih luas lagi. Kesetaraan dalam kuasa berarti adanya kuasa yang seimbang antara laki-laki dan perempuan, satu tidak mendominasi atau berada dalam posisi dominan atas lainnya. Artinya perempuan mempunyai kekuasaan sebagaimana juga laki-laki, untuk mengubah kondisi posisi, masa depan diri dan komunitasnya. Kesetaraan dalam kuasa merupakan prasyarat bagi terwujudnya kesetaraan gender dan keberdayaan dalam masyarakat yang sejahtera.

Dalam pembahasan ini, lima dimensi pembangunan perempuan merupakan kerangka analisis yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi ketimpangan sebagai akibat masih adanya sistem diskriminasi gender. Ketimpangan yang dimaksud di sini adalah mengenai

proses pemampuan perempuan, lebih khususnya adalah partisipasi perempuan dalam pembangunan desa. Melalui analisis gender perspektif Longwe, akan dapat diidentifikasi implikasi partisipasi perempuan terhadap peningkatan kapabilitas perempuan di Desa Babausalam Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat.

2.4.4 Peran Perempuan Dalam Pembangunan

Di Indonesia pembahasan dan penyelesaian tentang wanita atau perempuan sama pentingnya dengan pembahasan dan penyelesaian di segala bidang. perempuan hanya dianggap sebagai subyek yang pekerjaannya sebagai konsumen penghabis gaji atau pendapatan yang diperoleh suami. Anggapan seperti tidak dapat dibenarkan, karena disadari perempuan juga berkemampuan untuk mencari nafkah atau gaji untuk mendapatkan alternatif pendapatan dan berprestasi. Berdasarkan uraian di atas, pengertian dari peran ganda perempuan dalam pembangunan adalah kegiatan, tugas, ataupun partisipasi perempuan yang mencakup sektor domestik maupun sektor publik pada masa sekarang yang dikenal dengan masa pembangunan.

Perempuan sebagai pemegang peranan penting bahkan utama dalam bidang politik bukanlah hal baru dalam sejarah kehidupan bangsa ini. Sebagaimana telah diketahui bahwa perempuan telah menjadi aktor penting dalam perjuangan kaum nasionalis dalam lingkungan publik yang menandai masuknya bangsa ini ke era modernitas. Dapat dikatakan bahwa pra modernitas senantiasa diiringi dengan adanya proses pembangunan. Pengertian proses pembangunan adalah perubahan sosial budaya yang akan meliputi pula

perubahan nilai. Wanita di samping sebagai istri, ibu diharapkan aktif dalam organisasi dimana suami bekerja, karena status istri sebagai pendamping suami dan menurut informasi turut menentukan kondisi suami. Untuk dapat berpartisipasi dengan baik dalam masyarakat, pendidikan merupakan syarat yang mutlak (Soedarsono dan Murniatmo 1986:60).

Pergeseran dan peran (pembagian kerja) antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga dan rumah tangga, terjadi ketika seorang ibu mempunyai peran yang sangat penting di dalam masyarakat dan Negara. Di mana peran wanita tidak hanya untuk dipimpin tetapi juga untuk memimpin. Hal itu harus mendapatkan pengakuan yang positif pasti. peran privat dan publik tidak relevan jika diterapkan dalam masyarakat Jawa, karena dalam masyarakat Jawa wanita sudah terbiasa dengan peran privat sekaligus publik. Hal ini terutama terjadi pada masyarakat Jawa golongan petani dan pedagang, dimana wanita mengurus rumah tangga (domestic) sekaligus mencari nafkah (ekonomi-publik). Pola pembagian privat dan publik sesungguhnya telah dipatahkan oleh ideologi produksi yang menganut paham fungsionalisme struktural. Paham ini mengatakan bahwa pembagian privat-publik berlawanan dengan ideologi produksi. Menurut ideologi produksi, wanita juga memproduksi. Dalam Sociological Theory atau dalam penjabaran teori sosiologi, Demi keberhasilan pembangunan diperlukan peran serta dari perempuan, oleh karenanya dorongan, bantuan moril, dan pengertian dari kaum laki-laki dari suami khususnya sangat diperlukan.

2.5 Pemberdayaan Masyarakat

2.5.1 Definisi pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan pembangunan manusia memberikan ruang dan kesempatan yang lebih besar kepada masyarakat sebagai subyek dan pengguna hasil-hasil pembangunan untuk menentukan sendiri program-program dan tujuan pembangunan sesuai masalah kebutuhan, dan potensi lingkungan setempat. Selain itu, pemberdayaan menjadi instrument yang efektif dalam upaya mendistribusikan pemerataan pendapatan kepada seluruh masyarakat sehingga dapat memacu munculnya pelaku-pelaku usaha yang lebih merata di kalangan masyarakat bawah atau masyarakat akar rumput. Dengan demikian dapat diharapkan bahwa pemberdayaan masyarakat bisa diandalkan sebagai instrument penting dalam menanggulangi kemiskinan, pengangguran, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat (Mulyono, 2016:49).

Secara konseptual, pemberdayaan (*empowerment*), berasal dari kata 'power' (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan (Suharto, 2005:57). Pemberdayaan berkaitan dengan kemampuan manusia yaitu manusia secara perorangan maupun manusia dalam kelompok yang rentan dan lemah. Di sini, Suharto (2005:58) menyatakan bahwa :

Pemberdayaan diarahkan untuk meningkatkan kemampuan dalam :

- a. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka demikian kebebasan (*freedom*) dalam arti bukan saja bebas mengemukakan

pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan.

- b. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatnya dan memperoleh barang-barang dan jasa yang mereka perlakukan,
- c. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Kartasmita (1996:144) menyatakan bahwa pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat, yaitu upaya memberdayakan masyarakat yang dimulai dari penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penmgguna indifidu anggota masyarakat tetapi juga pranata-pranatanya.

2.5.2 Indikator Pemberdayaan

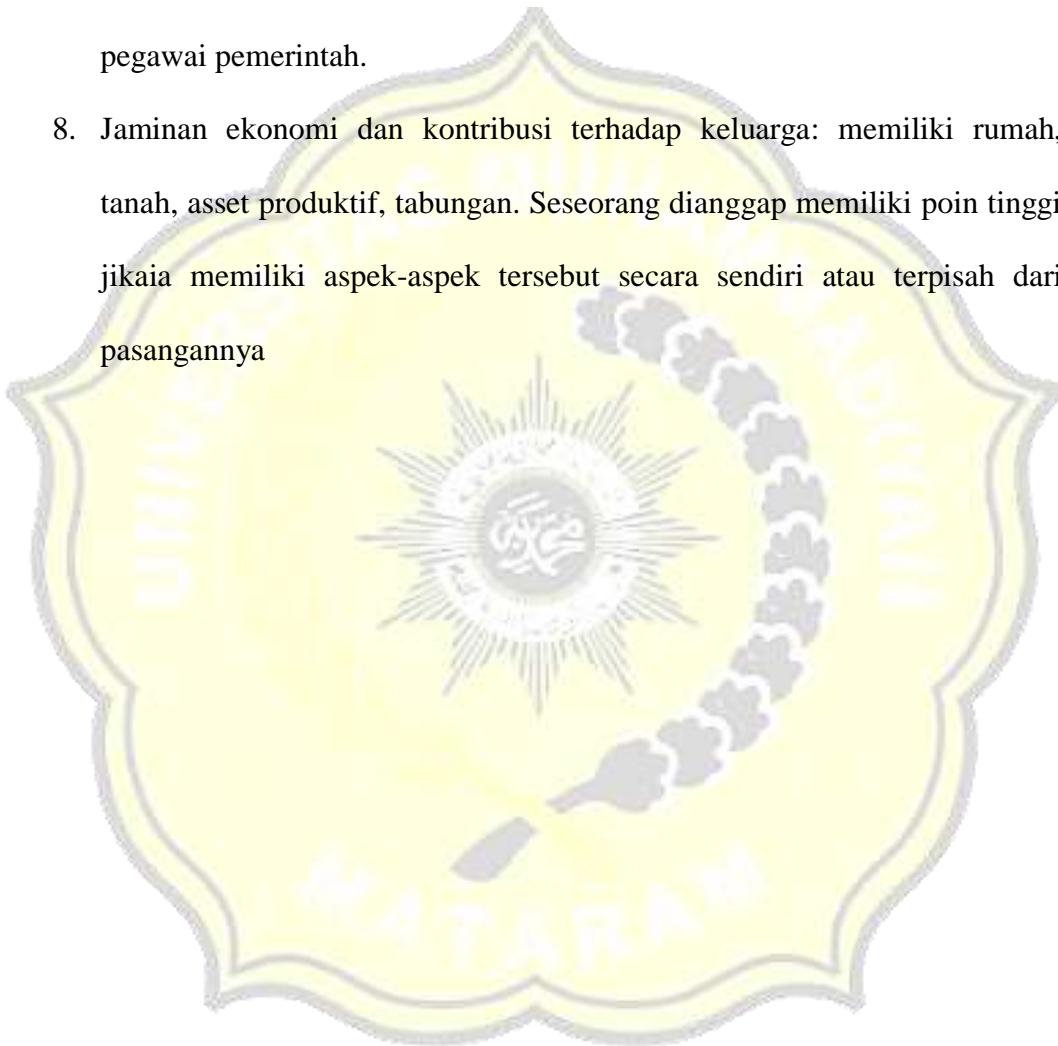
Schuler, Hashemi dan Riley mengembangkan beberapa indikator pemberdayaan, yang mereka sebut sebagai empowerment index atau indeks pemberdayaan (Girvan, 2004):

1. Kebebasan mobilitas: kemampuan individu untuk pergi ke luar rumah atau wilayah tempat tinggalnya, seperti ke pasar, fasilitas medis, bioskop, rumah ibadah, ke rumah tetangga. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika individu mampu pergi sendirian
2. Kemampuan membeli komoditas 'kecil': kemampuan individu untuk membeli barang kebutuhan keluarga sehari-hari (beras, minyak tanah,

minyak goreng, bumbu); kebutuhan dirinya (minyak rambut, sabun mandi, rokok, bedak, sampo). Individu dianggap mampu melakukan kegiatan ini terutama jika ia dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin pasangannya; terlebih jika ia dapat membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri.

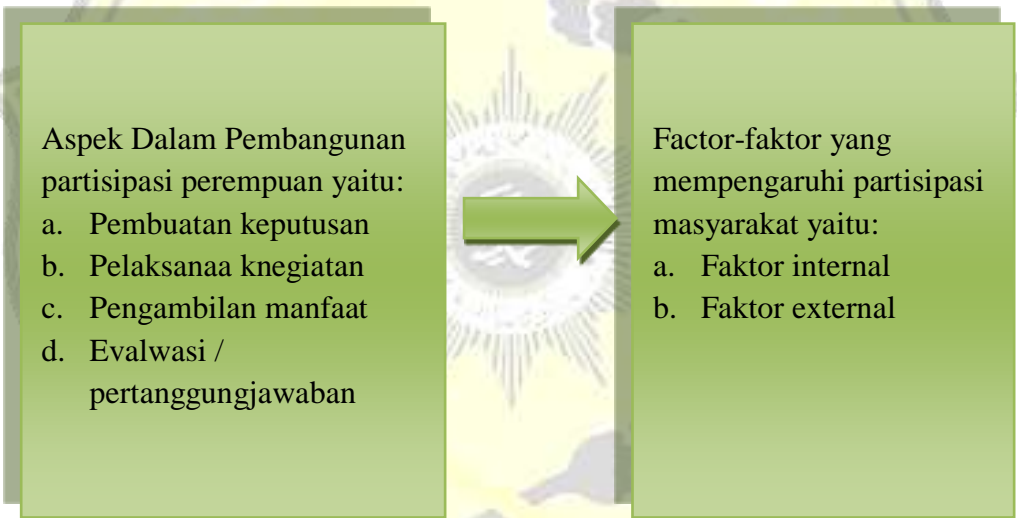
3. Kemampuan membeli komoditas 'besar': kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder atau tersier, seperti lemari pakaian, TV, radio, koran, majalah, pakaian keluarga. Seperti halnya indikator di atas, poin tinggi diberikan terhadap individu yang dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin pasangannya; terlebih jika ia dapat membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri.
4. Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga: mampu membuat keputusan secara sendiri maupun bersama suami/istri mengenai keputusan-keputusan keluarga, misalnya mengenai renovasi rumah, pembelian kambing untuk ditanam, memperoleh kredit usaha.
5. Kebebasan relatif dari dominasi keluarga: responden ditanya mengenai apakah dalam satu tahun terakhir ada seseorang (suami, istri, anak-anak, mertua) yang mengambil uang, tanah, perhiasan dari dia tanpa ijinnya; yang melarang mempunyai anak; atau melarang bekerja di luar rumah.
6. Kesadaran hukum dan politik: mengetahui nama salah seorang pegawai pemerintah desa/kelurahan; seorang anggota DPRD setempat; nama presiden; mengetahui pentingnya memiliki surat nikah dan hukum-hukum waris.

7. Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes: seseorang dianggap 'berdaya' jika ia pernah terlibat dalam kampanye atau bersama orang lain melakukan protes, misalnya, terhadap suami yang memukul istri; istri yang mengabaikan suami dan keluarganya; gaji yang tidak adil; penyalahgunaan bantuan sosial; atau penyalahgunaan kekuasaan polisi dan pegawai pemerintah.
8. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga: memiliki rumah, tanah, asset produktif, tabungan. Seseorang dianggap memiliki poin tinggi jika ia memiliki aspek-aspek tersebut secara sendiri atau terpisah dari pasangannya



2.6 Kerangka berpikir

Berdasarkan teori-teori tentang pembangunan, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat maka kerangka berpikir pada penelitian ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Desa. Partisipasi perempuan dalam pembangunan desa sangat diharapkan untuk meningkatkan pembangunan desa salah satunya adalah partisipasi perempuan sebagai bagian dari masyarakat, penyusun menyusun kerangka berpikir sebagai berikut.

A conceptual framework diagram consisting of two green rectangular boxes connected by a green arrow pointing from left to right. The left box lists aspects of women's participation, and the right box lists factors influencing participation.

Aspek Dalam Pembangunan partisipasi perempuan yaitu:

- Pembuatan keputusan
- Pelaksanaan kegiatan
- Pengambilan manfaat
- Evaluasi / pertanggungjawaban

Factor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat yaitu:

- Faktor internal
- Faktor external

2.7 Definisi Konseptual

Definisi konseptual yaitu suatu arti yang mewakili sejumlah objek yang mempunyai ciri sama

1. Pembangunan merupakan suatu proses berkelanjutan yang dilakukan untuk mencapai suatu keadaan yang lebih baik dari sebelumnya berdasarkan tujuan masing masing

2. Partisipasi merupakan keterlibatan seseorang atau kelompok dalam suatu organisasi baik secara mental maupun secara emosional untuk mencapai suatu tujuan.
3. Partisipasi perempuan adalah keterlibatan perempuan secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu perencanaan atau proses suatu kegiatan.

2.6 Definisi oprasional

A. Aspek partisipasi perempuan dalam pembangunan desa.

- 1 Pembuatan keputusan
 - a. Diskusi
 - b. Sumbangan pemikiran
- 2 Pelaksanaan Kegiatan
 - a. Menggerakkan SDM
 - b. Kordinasi
- 3 Pelaksanaan kegiatan
 - a. Keberhasilan
- 4 Evalwasi / pertanggungjawaban
 - a. Keberhasilan Program

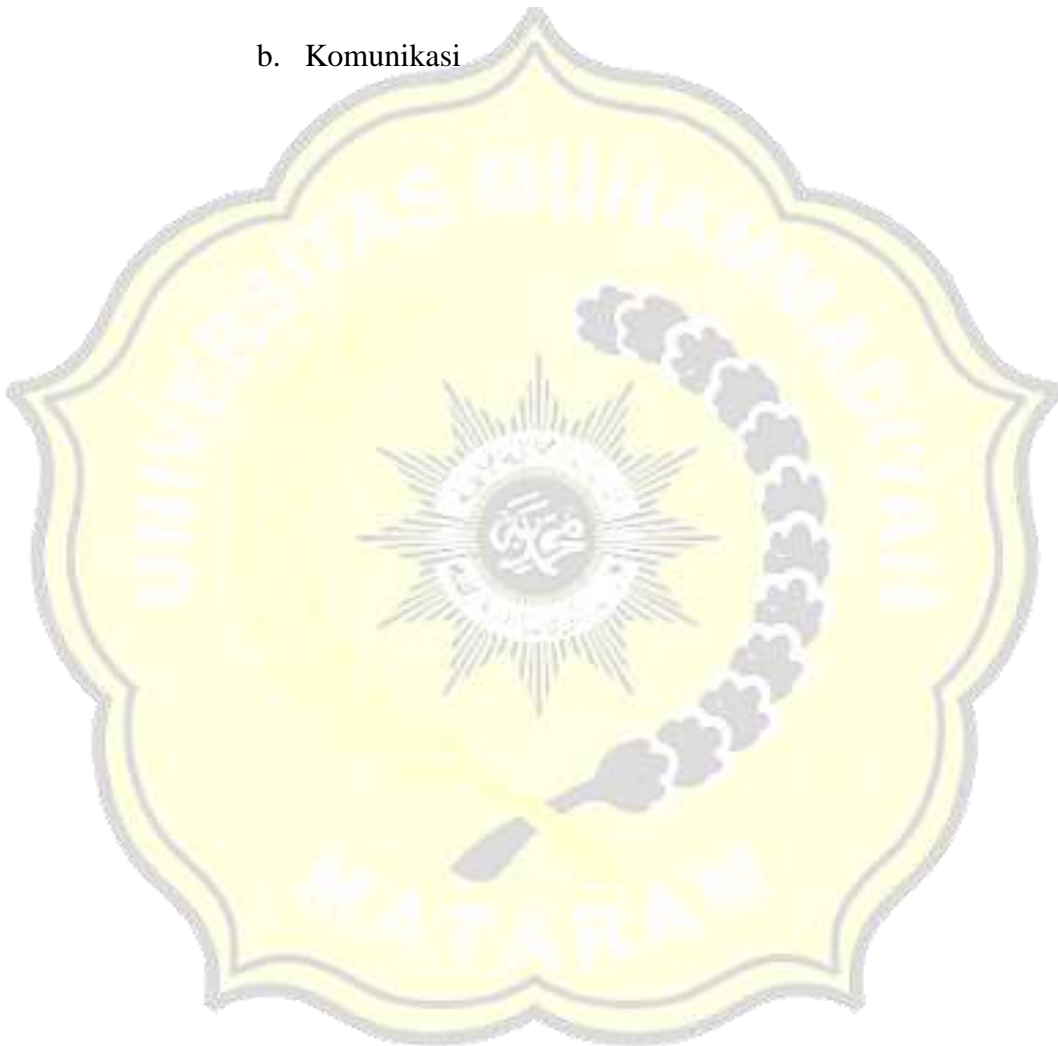
B. Faktor faktor yang mempengaruhi partisipasi dalam pembangunan desa.

- 1 Faktor internal
 - a. Faktor Kesadaran/Kemauan
 - b. Usia
 - c. Pendidikan
 - d. Pekerjaan dan penghasilan

- e. Lamanya tinggal
- f. Dukungan dari pemerintah
- g. Peralatan/Fasilitas

2 Faktor eksternal

- a. Kepemimpinan
- b. Komunikasi



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian kualitatif .Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah,(sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sample sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. (Sugiyano,2010 :50).

Jenis penelitian deskriptif bertujuan membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau objek tertentu. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu memberikan deskripsi atau uraian mengenai mengenai suatu gejala sosial yang diteliti. Dalam hal ini peneliti mendeskripsikan, atau menggambarkan suatu gejala yang sedang terjadi berdasarkan indikator-indikator tertentu dari konseptual yang oprasionalkan,dan tidak bermaksud menjelaskan suatu hubungan antarvariabel (Sugiyano,2010:100).

Metode deskriptif adalah metode yang tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada waktu sekarang dengan jalan mengumpulkan, menyusun, menjelaskan ,menganalisis dan mengumpulkan data.Dengan

demikian hasil penelitian ini nantinya akan dipaparkan data-data yang berkenan dengan partisipasi politik Perempuan pada pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 (Suyanto,2010:125).

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih sesuai dengan judul dan sangat sejalan dengan permasalahan yang di ajukan adalah Desa Babusalam, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok barat.

3.3. Informan Penelitian

Berdasarkan focus penelitian, maka sumber data digunakan adalah informan. Dalam menentukan informan dalam penelitian ini dipertimbangkan latar belakang perilaku dan peristiwa dan sesuai dengan kerangka dan perumusan masalah

Berdasarkan hal tersebut maka informan dalam penelitian ini adalah informan yang secara langsung terlibat dalam pelaksanaan pembangunan yang ada di desa babusalam kecamatan gerung kabupaten Lombok barat, yaitu

1. Sekertaris desa bausalam
2. Ketua PKK desa
3. Sekertaris PKK dan Ketua kader dusun
4. Masyarakat

3.4 Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer adalah data yang di dapatkan dari lapangan tempat penelitian yang di kumpulkan melalui panduan wawanaca, dan data ini di dapatkan pada informan ya telah di sebutkan pada informan penelitian.
2. Data sekunder adalah data pendukung yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan objek penelitian, data sekunder di dapatkan dari media masa, perpustakaan, dan *website*(umum dan pemerintahan).

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam Pengumpulan data pada dasarnya adalah merupakan sebuah produser yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Banyak masalah yang dirumuskan dan tidak akan biasa terpecahkan, karena metode untuk memperoleh data yang dipergunakan tidak memungkinkan ataupun data yang ada tidak akan menghasilkan data seperti yang diinginkan (Idrus, 2007:35).

1. Interview (Wawancara)

Yang dimaksud dengan wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara sipenanya dengan sipenjawab atau responden. Walaupun wawancara adalah proses percakapan yang berbentuk tanya jawab sambil tatap muka, wawancara adalah proses pengumpulan data atau suatu penelitian. Menurut Esterberg dalam Sugiyono wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. (Esterberg dalam Sugiyono (2013:231))

2. Pengamatan (Observasi)

Pengamatan digunakan untuk penelitian dan telah direncanakan secara sistematis. Penekanan observasi lebih pada upaya mengungkap makna makna yang terkandung pada aktivitas terarah tujuan. Tindakan saat menghadapi rintangan tujuan pada desa babusalam

3. Studi Dokumentasi

Adalah suatu cara untuk memperoleh data melalui peninggalan tertulis tentang arsip-arsip, buku-buku, pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian.

3.6 Teknik Analisis Data

Data mentah yang telah dikumpulkan oleh peneliti tidak akan ada gunanya jika tidak dianalisis. Analisa data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode penelitian, karena dengan analisa data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Data mentah yang telah dikumpulkan perlu di pecahkan dalam kelompok-kelompok, didalam kategorisasi, dilakukan manipulasi serta proses yang sedemikian rupa, sehingga data tersebut mempunyai makna untuk menjawab masalah dan bermanfaat untuk menguji hipotesis (Haris, 2010:100).

Dalam penelitian ini merupakan data kualitatif deskriptif, maka analisa yang dilakukan adalah bersifat induktif dan deskriptif. Data yang telah dikumpulkan kemudian disusun, dianalisa dan disajikan untuk memperoleh gambaran sistematis tentang kondisi dan situasi yang ada. Data-data tersebut diolah dan dieksplorasi secara mendalam yang selanjutnya akan menghasilkan

kesimpulan yang menjelaskan masalah yang diteliti. Proses analisa data dimulai dengan mengkaji dan menelaah sumber, baik sumber dari hasil wawancara maupun observasi yang sudah ditulis dalam catatan lapangan dan proses panafsiran data Moleong dalam Gaffar.(2006:190).

Dari uraian diatas, maka proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahap, yaitu :

1. Reduksi Data

Setelah data dikumpulkan, dibaca, maka langkah selanjutnya adalah mengadakan reduksi data.Reduksi data dilakukan dengan jalan membuat abstrak, yakni membuat rangkuman yang inti, membuang data yang tidak perlu, mengatur data dan pertanyaan-pertanyaan yang perlu di jaga agar tetap berada didalamnya, sehingga penarikan kesimpulan (verifikasi) akhir dari penelitian dapat dilakukan dengan mudah oleh peneliti.Dalam penelitian ini, data yang diperoleh peneliti dari kegiatan observasi yang berupa kata-kata inti harus segera dirangkum agar pertanyaan-pertanyaan tentang perilaku politik masyarakat tetap terjaga dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan. Bagong Suyanto dalam Sutinah, (2010:70)

2. Penyajian Data

Proses analisis selanjutnya adalah penyajian data yang mengorganisir informasi secara sistematis untuk mempermudah penelitian dalam menggabungkan dan merangkai keterikatan antar data dalam penyusunan gambaran proses serta memahami fenomena yang ada pada obyek penelitian. Melalui penyajian tersebut, telah memungkinkan peneliti untuk

menginterpretasikan fenomena-fenomena yang ada. Arikanto dalam Suharsimi (2006:90)

3. Penarikan Kesimpulan

Dari data yang diperoleh dilapangan, peneliti sejak awal mulai menarik kesimpulan. Kesimpulan itu mula-mula belum jelas dan masih bersifat pertanyaan yang telah memiliki landasan yang kuat dari proses analisis data terhadap fenomena-fenomena yang ada. Dalam penelitian ini, dapat diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi sehingga segera dapat di tarik suatu kesimpulan yang bersifat sementara. Agar kesimpulan itu lebih mantap maka peneliti memperpanjang waktu observasi. Dari observasi tersebut dapat ditemukan data baru yang dapat mengubah kesimpulan sementara, sehingga diperoleh kesimpulan yang mantap.